## PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA TAHUN 2025

No	Program		Kegiatan dan Sub Kegiatan		
(1)	(2)		(3)		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		01	Penyusunan rencana kerja tahunan,Renja/Renstra		
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
		07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan			
(1)	(2)		(3)		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
		2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		
		2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		
		2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
		2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
		01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan		
(1)	(2)	0.2	(3)	
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	
05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
		2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
		01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
		02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	
		04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
		2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan		
(1)	(2)		(3)	
		05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
		2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
		06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	

Kota Bima, Juli 2025

TAHKepala Dinas,

DINAS
PEUBERDAYANI PEREMPUNIH
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Syah udd n, SH MP. 19990707 198903 1 004